

COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGELOLAAN DESA WISATA TIRTA AGUNG DESA SUKOSARI KIDUL KABUPATEN BONDOWOSO

Andre Pratama Anhar¹, I Ketut Mastika², Panca Oktawirani³,

e-mail: andrepratammaanhar@gmail.com¹, I.ketut.mastika@gmail.com²,
panca.fisip@unej.ac.id³

Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Bumi Tegalboto, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *Collaborative Governance* pengelolaan desa wisata. Penelitian dilakukan di Desa Wisata Tirta Agung Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan destinasi wisata di Desa Sukosari Kidul diinisiasi non pemerintah yakni *civil society* pemuda Desa Sukosari Kidul. *Collaborative governance* pada Pengelolaan destinasi Desa Wisata Tirta Agung para *stakeholder* yang terlibat memiliki perbedaan sumber daya hal ini menjadi faktor terjadinya kolaborasi. Kolaborasi pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung dapat dikatakan memenuhi unsur model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash yang terdiri dari adanya desain kelembagaan dan kepala Desa Sukosari Kidul sebagai kepemimpinan fasilitatif kolaborasi pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung maupun dalam hal proses kolaborasi yang meliputi dialog tatap muka, komitmen bersama, pemahaman bersama dan hasil antara/manfaat. kolaborasi yang terjadi di Desa Sukosari Kidul dapat dikatakan berhasil namun komitmen bersama masih belum dikatakan optimal. Keberhasilan yang diraih pada kolaborasi yang terjadi antara *civil society* yakni Pokdarwis dan pemerintah Desa Sukosari Kidul yakni Desa Wisata Tirta Agung berhasil menjadi juara 2 dalam anugerah Desa Wisata Indonesia terbaik kategori rintisan (ADWI) 2022.

Kata-kata Kunci: Pengelolaan, desa wisata, kolaborasi.

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE MANAGEMENT OF TIRTA AGUNG TOURISM VILLAGE SUKOSARI KIDUL VILLAGE BONDOWOSO REGENCY

Abstract: This research aims to examine *Collaborative Governance* management of tourist villages. The research was conducted in the tourist village of Tirta Agung, Sukosari Kidul Village, Sumber Wringin District, Bondowoso Regency. The research method used is qualitative, data collection methods are carried out by interviews, observation and documentation. The results of the research show that the development of tourist destinations in Sukosari Kidul village was initiated by non-governmental organizations, namely the Sukosari Kidul village youth civil society. *Collaborative governance* in the management of the Tirta Agung Tourism Village destination, the stakeholders involved have different resources, this is a factor in collaboration. Collaborative management of the Tirta Agung Tourism Village can be said to fulfill the elements of the Collaborative Governance model according to Ansell and Gash which consists of institutional design and the village head of Sukosari Kidul as the facilitative leadership of the collaborative management of the Tirta Agung Tourism Village as well as in terms of a collaboration process which includes face-to-face dialogue, joint commitment, shared understanding and intermediate outcomes/benefits. The collaboration that took place in Sukosari Kidul village can be said to be successful, but the joint commitment is still not optimal. The success achieved in the collaboration between civil society, namely the Pokdarwis and the Sukosari Kidul village government, namely the Tirta Agung Tourism Village, succeeded in becoming 2nd place in the award for the best Indonesian Tourism Village in the pioneer category (ADWI) 2022.

Keywords: Management, tourist village, collaboration.

PENDAHULUAN

Collaborative Governance yang terjadi di Desa Sukosari Kidul dirintis setelah adanya keterpurukan usaha BUMDes di bidang simpan pinjam. Inisiasi gerakan tersebut dilakukan oleh kalangan pemuda desa (*civil society*) yang bersatu padu melakukan pemikiran untuk membentuk desa wisata. Melalui tradisi “cangkrukan” Pemuda desa Sukosari Kidul merintis gerakannya yang disebut “Gerakan Bangkit dari Keterpurukan. Setelah ada kebulatan tekad, para pemuda meluaskan lingkup diskusinya terkait keinginan membangun usaha BUMDes di bidang pariwisata dalam lingkup desa. Pemerintah desa memfasilitasi rembug lintas pihak merencanakan pembangunan objek wisata berbasis masyarakat lokal yang dikelola oleh BUMDes Desa Sukosari Kidul. Desa wisata yang dibentuk di Desa Sukosari Kidul kemudian diberi nama Desa Wisata Tirta Agung, tepatnya dirintis mulai tahun 2018.

Beberapa fasilitas wisata dibangun seperti kolam renang dan fasilitas pendukung guna menarik minat pengunjung berwisata memanfaatkan hari libur melakukan aktivitas rekreatif. Selanjutnya, melakukan MoU bersama pelaku usaha lokal dalam bentuk perjanjian kerjasama usaha BUMDesa dan Pengusaha Lokal serta UMKM dalam *sharing profit* maupun *sharing product*. Aktivitas lain adalah memberi ruang karya dan pendekatan persuasif kepada tokoh kunci, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta model penataan peran yang terkonsep dan sistematis (apresiasi karya, melibatkan pekerjaan dalam aktivitas wisata, maupun memasarkan produk warga). Pemuda perintis desa wisata kemudian menetapkan “Visi” pembangunan pariwisata berkelanjutan, serta merintis dukungan lintas *stakeholder* desa serta hadirnya dukungan *Pentahelix* meliputi: pemerintah, pengusaha/swasta, akademisi, media dan masyarakat, yang selanjutnya penguatan visi dengan menggunakan metode *brainstorming*/jajak pendapat.

Gagasan pengembangan Desa Wisata Tirta Agung di Desa Sukosari Kidul yang diinisiasi oleh pemuda desa merupakan terobosan dalam menggali potensi ekonomi desa melalui rencana pengembangan desa wisata. Pergerakan pemuda dalam membentuk forum dengan pelibatan berbagai *stakeholder* guna mencapai suatu tujuan tertentu, yang kemudian mendapat dukungan pemerintah daerah Bondowoso merupakan bentuk *collaborative governance*. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Donahue dan Zeckhauser (2011) bahwa *collaborative governance* merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik dilakukan melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu.

Terjadinya proses kolaborasi pada saat aktor pemerintah dengan aktor non-pemerintah melaksanakan pengambilan kebijakan untuk masalah yang dihadapi publik, merupakan proses *Collaborative Governance* dimana para aktor harus aktif melaksanakan tugasnya berdasarkan pembagian peran dalam proses kolaborasi (Bevir, 2009). Dipertegas oleh Ansell & Gash (2008) bahwa kolaborasi antar aktor kebijakan publik yang mana dalam hal ini mendeskripsikan sebuah kerjasama yang mempunyai legalitas agar prosesnya menghasilkan keakuratan serta mengarah kepada aksi kolektif untuk proses formulasi kebijakan publik.

Desa Wisata Tirta Agung yang ditetapkan secara resmi sebagai desa wisata dengan nama Desa Wisata Tirta Agung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso nomor: 188.45/329/430.4.2/2019 tentang Penetapan Desa Sukosari Kidul sebagai Desa Wisata. Desa Wisata Tirta Agung pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tirta Agung yang telah disahkan dengan SK Badan Hukum Indonesia Nomor: AU-0003265.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Sadar Wisata Tirta Agung. Usaha para pemuda desa mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah desa baik pembenahan maupun pengembangan Desa Wisata Tirta Agung.

Dalam meningkatkan jumlah pengunjung, Desa Wisata Tirta Agung melibatkan para pihak dalam pengelolaannya, seperti Pemerintah Desa melalui BUMDes maupun kelompok masyarakat yakni Pokdarwis. Kolaborasi ini menunjukkan dampak positif bagi kemajuan Desa Wisata maupun perekonomian masyarakat sekitar, seperti munculnya UMKM di sekitar Desa Wisata Tirta Agung sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi pemerintah desa maupun penerimaan daerah. Layanan wisata Desa Wisata Tirta Agung berkembang berupa: gazebo apung, kolam renang alami, Kafe Kala Senja yang memiliki keunikan dan keindahan. Adapun jam operasionalnya sampai jam 09.00 - 22.00. Perkembangan Desa Wisata Tirta Agung, selain adanya inisiatif anak-anak muda dan masyarakat, juga tidak terlepas dari peran dan dukungan Pemerintah Desa Sukosari Kidul.

Collaborative governance yang telah berjalan selama ini ditunjukkan oleh adanya pembentukan Pokdarwis oleh Pemerintah desa pun serta dukungan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata kabupaten serta dukungan *Pentahelix* mengantarkan Desa Wisata Tirta Agung pada keikutsertaannya dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 dan berhasil memperoleh predikat sebagai juara 2

dalam ADWI 2022 kategori Desa Wisata Rintisan Tingkat Nasional. Keberhasilan dalam ajang ADWI 2022 itu melahirkan kebanggaan sekaligus tantangan untuk meningkatkan lagi kualitas pengelolaan desa wisata agar setidaknya dapat mempertahankan posisi yang telah diperoleh, bahkan berusaha untuk meningkatkan lagi kualitas destinasi desa wisata sesuai kriteria yang ada. Upaya peningkatan kualitas destinasi desa wisata akan memiliki peluang apabila kualitas *collaborative governance* juga dapat ditingkatkan.

Keterlibatan non pemerintahan pada pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung seiring berkembangnya paradigma pembangunan dimana pemerintah bukan lagi menjadi satu-satunya aktor dalam pembangunan membawa pengaruh pada pengembangan Desa Wisata Tirta Agung. Paradigma perkembangan administrasi publik dimulai dari era *administration dichotomy* sampai dengan era *governance* hingga sampai akhirnya lahirnya konsep "*collaborative governance*". Pergeseran paradigma administrasi publik menurut Henry (2007) adalah *The Politics - Administration Dichotomy*, (1900 - 1926); *The Principles of Administration*, (1927 - 1937); *Public Administration as Political Science*, (1950 - 1970); *Public Administration as Management*, (1956 - 1970); *Public Administration as Public Administration*, (1970 - sekarang); *Governance*, (1990 - sekarang). Paradigma yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah *Governance*. *Governance* didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara, memiliki proses yang kompleks di mana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, memberlakukan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung berpengaruh kepada masyarakat dan lembaga serta berpengaruh pula pada pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014).

Ansell & Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu kegiatan kerja sama untuk menentukan keputusan dengan tujuan menyelesaikan masalah publik yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dan pihak terkait lainnya, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut Ansell & Gash (2008) juga menjelaskan tentang model *collaborative governance* yang memiliki 4 komponen, yaitu: 1) *starting condition*; 2) kepemimpinan fasilitatif; 3) desain institusional; dan 4) proses kolaborasi.

Pencapaian prestasi yang diraih oleh Desa Wisata Tirta Agung ini menggambarkan betapa baiknya daya saing yang dimiliki Desa Wisata Tirta Agung. Menurut Hidayah (2019), daya saing sebuah destinasi pariwisata diperoleh melalui tercapainya tujuan fungsi-fungsi destinasi yang salah satunya

fungsi koordinasi, bahwa fungsi koordinasi organisasi pengelola destinasi wisata memiliki keluaran (*ouput*) kolaborasi yang kompak (*cohesive collaboration*) dari para *stakeholder* destinasi yang terlibat di Desa Wisata Tirta Agung Pemerintah desa dan masyarakat. Dengan kata lain keberhasilan yang diperoleh oleh Desa Wisata Tirta Agung sangat dipengaruhi oleh kolaborasi yang baik dari para aktor-aktor yang terlibat didalamnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana *collaborative governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso? Tujuan penelitian adalah untuk menelaah dan menemukan pola *collaborative governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung melibatkan pemerintah desa, masyarakat.

Kolaborasi adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu keberhasilan bagi kedua belah pihak yang mana sebagai bentuk proses sosial yang saling membantu dalam kegiatan untuk mencapai tujuan bersama (Widyarto, 2017). Dalam penelitian ini kolaborasi pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung melibatkan Pemerintah desa, Pokdarwis berdampak bagi Desa Wisata Tirta Agung berhasil menjadi 50 desa wisata terbaik. *Collaborative governance* merupakan ranah kerjasama antar lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta dan masyarakat yang di dalamnya terdapat kepemimpinan, peran, kapasitas, motivasi, kepentingan, solusi, sumberdaya, untuk saling melengkapi, saling memberi manfaat guna mengoptimalkan potensi yang ada di Desa Sukosari Kidul yakni pengembangan destinasi desa wisata. Peneliti menggunakan model *Collaborative Governance* menurut Ansell & Gash (2008). Proses kolaborasi ini memiliki dimensi yakni dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses serta pemahaman bersama.

Penelitian terdahulu oleh Kirana & Artisa (2020) menunjukkan bahwa dalam pengembangan desa wisata, Pemerintah Kota Batu melibatkan sektor swasta, akademisi, media dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan. Dalam pelaksanaan *collaborative governance* tersebut, dibutuhkan komunikasi yang efektif guna memudahkan para aktor melakukan kolaborasi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan desa wisata. Penelitian selanjutnya oleh Mafaza & Setyowati (2020) mendapatkan hasil bahwa *collaborative governance* diantara para *stakeholder* dalam Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di Desa Borobudur Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan para *stakeholder* sudah menjalankan tugas pokoknya. Berdasarkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi Awal Kolaborasi

Kondisi awal ini merupakan awal mula adanya pengembangan destinasi desa wisata di Desa Sukosari Kidul yakni Desa Wisata Tirta Agung. Menurut Ansell & Gash (2008) pada tahapan kondisi awal meliputi sejarah kerja sama, ketidakseimbangan sumber daya maupun adanya saling ketergantungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis dan Kepala Desa Sukosari Kidul, kondisi awal terjadinya kolaborasi berawal adanya kesadaran dari pemuda Desa Sukosari Kidul untuk mengembangkan desa wisata salah satunya melakukan bersih-bersih desa. Akan tetapi kolaborasi ini terjalin adanya keterlibatan pemerintah Desa Sukosari yakni memberikan dukungan bagi para pemuda desa yang ingin mengembangkan destinasi desa wisata salah satunya membentuk Pokdarwis kelompok sadar wisata dan memberangkatkan ke Desa Pujon Kidul Batu Malang maupun bantuan dana bagi penunjang sarana dan prasarana di Desa Wisata Tirta Agung.

Fenomena kolaborasi yang terjadi di Desa Sukosari Kidul menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Ansell & Gash bahwa adanya ketidakseimbangan sumber daya menyebabkan para pihak melakukan kolaborasi. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Sukosari Kidul dalam pengembangan desa wisata yakni pemerintah memberikan dukungan seperti modal maupun pembinaan Pokdarwis, Pokdarwis Tirta Agung berperang sebagai meningkat jumlah kunjungan wisatawan seperti melakukan promosi, inovasi maupun *event-event* acara yang diselenggarakan di Desa Wisata Tirta Agung.

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada protokol dasar atau aturan dasar untuk berkolaborasi dan bagaimana forum kolaborasi para pihak yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Tirta Agung itu didesain mempunyai aturan yang jelas dan dalam prosesnya memiliki keterbukaan. Para *stakeholder* yang terlibat pada pengembangan Desa Wisata Tirta Agung memiliki aturan dasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Sukosari Kidul dan Ketua Pokdarwis, desain kelembagaan pada pengembangan Desa Wisata Tirta Agung memiliki aturan dasar seperti Surat Keputusan dari pemerintah desa maupun MoU perjanjian kerja sama. Desain kelembagaan pada kolaborasi amatlah sangat penting bagi para *stakeholder* yang terlibat pada

penelitian oleh Akbar et al. (2022) ditemukan bahwa proses kolaborasi dimulai dari *face to face dialogue* atau komunikasi intensif antar aktor. Selain itu, faktor *starting conditions, institutional design, dan facilitative leadership* menjadi faktor pendukung dalam kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Gubugklakah.

Penelitian oleh Utami et al. (2021) menunjukkan bahwa *collaborative governance* masih menemui banyak kendala, hal ini dibuktikan dengan analisis model *collaborative governance* Ansell & Gash, seperti: ketegasan aturan, pemahaman visi misi bersama, komitmen dan partisipasi yang kurang. Faktor keberhasilan yang mendukung, yaitu: kepercayaan yang kuat, adanya peraturan, adanya pembagian tanggung jawab, pembagian informasi dan tersedianya sumber daya, di samping itu ada beberapa indikator yang belum terpenuhi, yaitu: struktur jaringan, komitmen dan kejelasan tata kelola. Penelitian Bela & Utama (2022) menunjukkan model *collaborative governance* ini lebih menekankan pada proses diskusi dalam memetakan hambatan dan peluang untuk terselenggaranya kegiatan kolaborasi. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas yakni tentang *Collaborative Governance* dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan baik dari pisau analisis yakni teori yang digunakan maupun fokus penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Fokus penelitian adalah proses dan pelaksanaan *Collaborative Governance* yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung sehingga berhasil mendapatkan nominasi 50 desa terbaik di Indonesia. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan secara langsung melalui wawancara langsung maupun tidak langsung (melalui media komunikasi) oleh para informan instansi terkait pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung. Data sekunder berasal dari penelitian terdahulu, berita *online*, maupun dokumen atau arsip-arsip lainnya. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

pengembangan Desa Wisata Tirta Agung yakni memperkuat legitimasi kolaborasi dengan adanya surat Keputusan dari desa maupun MoU hal ini akan menjelaskan siapa saja *stakeholder* yang terlibat baik dari internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukosari Kidul, desain kelembagaan yang terjadi pada kolaborasi pengembangan Desa Wisata Tirta Agung bukan hanya menjelaskan mengenai aturan dasar seperti MoU perjanjian kerja sama, namun menjelaskan mengenai struktur *stakeholder* yang terlibat pengembangan Desa Wisata Tirta Agung. Kolaborasi yang terjadi di pengembangan Desa Wisata Tirta Agung menjelaskan mengenai peran *stakeholder* yang terlibat seperti dari pemerintah desa mendukung dengan adanya pengembangan Desa Wisata Tirta Agung yakni memfasilitasi baik dari dana yang diwakili oleh BUMDes dan Pokdarwis sebagai ketua pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif salah satu hal penting dengan adanya kolaborasi. Fungsi kepemimpinan pada kolaborasi yang terjadi ialah menyatukan para *stakeholder* dalam melakukan evaluasi pada pengembangan Desa Wisata Tirta Agung. Pada kolaborasi yang terjadi di Desa Wisata Tirta Agung memiliki kepemimpinan fasilitatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukosari Kidul, kolaborasi pada pengembangan Desa Wisata Tirta Agung memiliki kepemimpinan fasilitatif yakni Kepala Desa Sukosari Kidul yang menginisiasi mengadakan rapat evaluasi pada pengembangan Desa Wisata Tirta Agung maupun memfasilitator para *stakeholder* yang terlibat baik dari internal maupun eksternal. Dengan adanya kepemimpinan fasilitatif pada kolaborasi pengembangan Desa Wisata Tirta Agung bertujuan untuk menyatukan para *stakeholder* yang terlibat.

Proses Kolaborasi

1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka merupakan pertemuan para *stakeholder* yang terlibat pengembangan Desa Wisata Tirta Agung dalam satu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga akan terjadi adanya dialog secara langsung atau interaktif, yang bertujuan untuk membangun komitmen para pihak, kepercayaan, pemahaman bersama dan evaluasi pengembangan Desa Wisata Tirta Agung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukosari Kidul, Ketua Pokdarwis dan Pihak BUMDes, dialog tatap muka yang terjadi di Desa Wisata Tirta Agung yakni bermula ada inisiatif

kepala desa mengumpulkan para *stakeholder* terlibat seperti Pokdarwis dan BUMDes. Pada tahapan rapat yang diadakan pertama kali para *stakeholder* yang terlibat membahas strategi untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat desa yakni mengembangkan destinasi Desa Wisata Tirta Agung.

2. Komitmen terhadap Proses

Komitmen terhadap proses merupakan komitmen para *stakeholder* yang terlibat pada kolaborasi pengembangan desa wisata di Desa Sukosari Kidul untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh para aktor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes dan Ketua Pokdarwis, para *stakeholder* yang terlibat seperti kepada desa, Pokdarwis dan BUMDes memiliki kesamaan komitmen seperti ingin meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan menggali potensi yang ada di Desa Sukosari.

3. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama yang dimaksud yakni para *stakeholder* yang terlibat saling memberi tentang kemampuan masing-masing bidang untuk meningkatkan kinerja para *stakeholder* yang terlibat pada pengembangan desa wisata di Desa Sukosari Kidul. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukosari Kidul dan Ketua Pokdarwis, para *stakeholder* saling berbagai kemampuan seperti dari pihak kepala desa memberikan bantuan modal maupun memfasilitasi mengenai proses sejauh mana pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung, dari pihak Pokdarwis memberikan hasil evaluasi sejauh mana pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung dan sarana prasarana apa yang dibutuhkan di objek Desa Wisata Tirta Agung bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

4. Hasil Antara

Hasil antara merupakan hasil sementara atas proses terjalannya kerja sama yang berlangsung yang terdiri dari keuntungan dan manfaat yang didapat para pihak maupun dari masyarakat desa dengan adanya pengembangan Desa Wisata Tirta Agung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Pokdarwis, Pihak BUMDes dan masyarakat desa, ditemukan bahwa adanya kerja sama di bidang pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung pun memberikan manfaat bagi yang terlibat seperti Pokdarwis maupun BUMDes Sukosari Kidul saat ini memiliki unit usaha, akan tetapi dampak adanya Desa Wisata Tirta Agung pun bukan bermanfaat bagi Pokdarwis maupun BUMDes melainkan berdampak masyarakat desa.

Pembahasan

Desa Wisata Tirta Agung telah diresmikan oleh Bupati Bondowoso Salwa Arifin pada 13 April 2019, peresmian Desa Wisata Tirta Agung sebagai salah satu Desa Wisata yang ada di Kabupaten Bondowoso juga tertulis pada Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/329/430/4.2/2019 tentang Penetapan Desa Sukosari Kidul sebagai Desa Wisata.



Gambar 1. Peresmian Desa Wisata Tirta Agung

Pisau analisis yang digunakan peneliti dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung menggunakan *Collaborative governance* menurut Ansell & Gash adalah proses kegiatan kolaborasi untuk membuat suatu keputusan dengan melibatkan berbagai aktor lembaga publik dan pihak lainnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik (Ansell & Gash, 2008). *Collaborative governance* yang terjadi di Desa Wisata Tirta Agung melibatkan berbagai aktor mulai dari *governance* yakni pemerintah Desa Sukosari Kidul, BUMDES dan aktor *civil society* seperti Pokdarwis, lembaga kemasyarakatan.

Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan tahapan awal dalam membentuk relasi atau kerja sama dimana masing-masing *stakeholder* memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan memutuskan berkolaborasi untuk mencapai visi serta tujuan bersama. Ansell & Gash (2008) menjelaskan bahwa dalam suatu kolaborasi akan dipengaruhi oleh beberapa fenomena yaitu para *stakeholder* memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya dan pengetahuan.

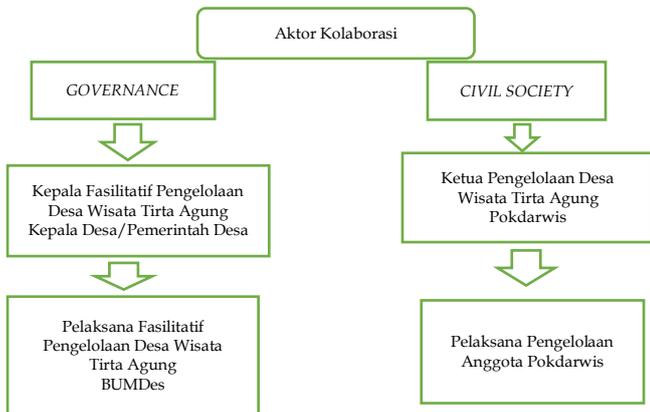
Pada tahun awal tahun 2019 seorang pemuda bernama Dani bersama para pemuda berupaya mengembangkan/menggali potensi desa salah satunya melakukan bersih-bersih desa. Seiring berjalannya waktu terdapat kesadaran kolektif dari para pemuda Desa Sukosari Kidul menginginkan adanya Desa Wisata di Desa Sukosari Kidul salah satunya terdapat waduk yang tidak lama dipergunakan dikembangkan menjadi Desa Wisata

yang ada di Sukosari Kidul. Akan tetapi pemuda desa Sukosari Kidul masih belum paham tentang Desa Wisata. Namun, dalam hal ini para pemuda desa mulai belajar mengenai Desa Wisata dengan melakukan studi banding ke Desa Wisata Pujon Kidul. Hal yang patut diapresiasi dari para pemuda Desa Sukosari dalam hal pendanaan melakukan studi banding ke Desa Wisata Pujon Kidul dengan menggunakan iuran bersama dari para pemuda. Dengan kata lain inisiatif para pemuda yang ingin mengembangkan Desa Wisata tidak dapat berjalan sendiri karena diperlukan kerja sama berbagai *Stakeholder*. *Stakeholder* yang bekerja sama dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung yakni pemerintah desa, BUMDes.

Fenomena yang mendorong terbentuknya *collaborative governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung karena adanya ketidakseimbangan sumber daya, dimana waduk yang lama tidak layak pakai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata oleh para pemuda merupakan kepemilikan tanah kas pemerintah desa Sukosari Kidul, sedangkan pemerintah desa Sukosari Kidul memiliki sumber daya yakni kepemilikan tanah waduk yang akan jadi dikembangkan menjadi Desa Wisata. Akan tetapi para pemuda memiliki pengetahuan yang dapat disampaikan ke pemerintah desa agar waduk dimanfaatkan untuk pengembangan Desa Wisata. Dengan kata lain tujuan adanya kolaborasi sendiri untuk mengisi kekosongan atau kekurangan yang dimiliki oleh *stakeholder* terkait. Sehingga dapat dikatakan *Collaborative Governance* pada pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung terjadi antar pemerintah dan masyarakat.

Desain Kelembagaan

Dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung kolaborasi yang terbangun berdasarkan kesamaan tujuan. *Stakeholder* berinteraksi baik secara formal maupun informal dalam sebuah aturan yang disepakati. Bertujuan untuk mendukung hal tersebut pembentukan lembaga yang mengelola Desa Wisata Tirta Agung dalam hal ini pembentukan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Tirta Agung yang disahkan dengan Surat keputusan Kepala desa yang telah disahkan dengan SK badan hukum Indonesia Nomor : AU-0003265.AH.01.07 tahun 2020. Desain kelembagaan pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung menjelaskan peran para *stakeholder* yang terlibat.



Gambar 2. Desain Kelembagaan Pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung

Desain kelembagaan dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung sudah jelas mengenai peran masing-masing *stakeholder* yang terlibat sebagai berikut:

1. Kepala desa sebagai ketua fasilitator
2. BUMDes sebagai sarana kepala desa menyalurkan dana pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung
3. Pokdarwis sebagai ketua pelaksana pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung
4. Anggota Pokdarwis sebagai pelaksana pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung

Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam mengambil sebuah keputusan, peran pemimpin sangat penting dalam *collaborative governance*. Ansell & Gash (2008) mengatakan bahwa kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses kolaborasi, dengan proses kolaborasi sebagai utama yang dipengaruhi oleh kepemimpinan dan kelembagaan dalam mencapai sebuah hasil. Berdasarkan hasil di lapangan, dijelaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung dilakukan oleh Kepala Desa Sukosari Kidul. Hal ini dibuktikan dengan awal proses pertemuan pertama diinisiasi Kepala Desa Sukosari Kidul yang melibatkan para pemuda desa dan perwakilan BUMDes dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung, mengingat posisi yang dapat menjalin komunikasi atau penghubung antara pemerintah, masyarakat dan akademisi. Serta kepala desa memfasilitasi diskusi antar *stakeholder* serta membentuk kelembagaan pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung.

Proses Kolaborasi

1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka yang dilakukan *stakeholder* yang terlibat pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung melalui musyawarah/rapat.

Musyawarah ini selalu dilakukan 4 pertemuan per 3 bulan. Pelaksanaan musyawarah dihadiri oleh kepala desa, pihak BUMDes, ketua Pokdarwis, anggota Pokdarwis. Akan tetapi waktu musyawarah yang dilakukan fleksibel jika akan mengadakan kegiatan di kawasan Desa Wisata Tirta Agung. Pokdarwis juga terkadang mengikuti pertemuan lembaga kemasyarakatan untuk mengadakan kegiatan di kawasan Desa Wisata Tirta Agung.



Gambar 3. Kegiatan Musyawarah yang Didampingi *Stakeholder* mengenai Kegiatan yang Diselenggarakan di Kawasan Desa Wisata Tirta Agung

2. Komitmen terhadap Proses

Komitmen ini berkaitan dengan pengakuan masing-masing bahwa mereka memiliki ketidakseimbangan sumber daya. Komitmen pemerintah desa yakni terus melakukan Upaya pengembangan Desa Wisata Tirta Agung dengan melakukan Pembangunan keberlanjutan, sedangkan dari pihak Pokdarwis memiliki komitmen menjalankan tugas sebagai pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung seperti meningkatkan kunjungan wisatawan melakukan promosi dengan membuat akun media sosial Desa Wisata Tirta Agung maupun mengadakan *event-event* yang diselenggarakan di kawasan Desa Wisata Tirta Agung.



Gambar 4. Acara *Event* di Kawasan Desa Wisata Tirta Agung

Akan tetapi komitmen yang terlihat dalam kolaborasi pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung saat ini masih kurang kuat dari pihak pemerintah desa. Pemerintah desa sudah berkomitmen kuat untuk mengembangkan Desa Wisata Tirta Agung dengan melakukan pembangunan keberlanjutan sarana dan prasarana yang ada di Desa Wisata Tirta Agung. Akan tetapi melihat fenomena kondisi sarana prasarana saat ini masih belum adanya perbaikan seperti jembatan gazebo apung perlu adanya perbaikan.



Gambar 5. Sarana Prasarana yang Masih Belum Diperbarui



Gambar 7. Pencapaian Prestasi Desa Wisata Tirta Agung

Adanya Desa Wisata Tirta Agung berdampak bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa. Dari pihak pemerintah desa yakni BUMDes Sukosari Kidul memiliki unit usaha jasa Desa Wisata, dari masyarakat memiliki pekerjaan di kawasan Desa wisata seperti menjaga di loket karcis maupun penjaga parkir.

3. Pemahaman Bersama

Pemahaman antara *stakeholder* mengenai visi misi dan tujuan adanya Desa Wisata Tirta Agung memiliki kesamaan yakni mengembangkan Desa wisata di Desa Sukosari Kidul bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa maupun perekonomian masyarakat Desa Sukosari Kidul. Pemahaman kesamaan *stakeholder* yang terlihat pada pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung, dimana pemerintah desa melakukan pembinaan maupun pelatihan Pokdarwis.



Gambar 6. Pelatihan Pokdarwis

4. Hasil Sementara

Adanya kolaborasi pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung, jika dilihat perkembangan saat ini Desa Wisata Tirta Agung mendapatkan pencapaian prestasi berhasil menjadi juara 2 dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022 kategori desa wisata rintisan tingkat nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Pola *Collaborative Governance* pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung awal mulanya kolaborasi diinisiasi oleh pemuda desa yang ingin menggali potensi Desa Sukosari Kidul salah satunya waduk yang tidak dipakai yang akan dikembangkan desa wisata oleh para pemuda Desa Sukosari Kidul. Faktor yang mendorong terjadinya *Collaborative Governance* ini yaitu para *stakeholder* terlibat memiliki latar belakang yang berbeda maupun potensi yang dimiliki salah satunya pemerintah desa yang memiliki potensi modal sosial seperti dana desa, kepemilikan atas tanah waduk yang akan dikembangkan menjadi Desa Wisata dan Pokdarwis memiliki pengetahuan mengenai Desa Wisata. Kolaborasi pengelolaan wisata ini sudah memenuhi unsur teori *Collaborative Governance* menurut Ansell & Gash yang terdiri dari Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaborasi meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama dan hasil yang didapatkan. Namun masih ada indikator yang belum dilakukan secara optimal yaitu komitmen bersama.

Saran

Para *stakeholder* yang terlibat bersama-sama memberikan saran maupun kritik mengenai pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung. Perlu adanya konsistensi dalam melakukan pembangunan keberlanjutan sarana prasarana di Desa Wisata Tirta

Agung. Dengan adanya penghargaan ADWI kategori rintisan dapat dijadikan sebagai acuan motivasi bagi pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 170–177. doi: 10.21776/ub.jiap.2022.008.02.5
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. doi: 10.1093/jopart/mum032
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2022). Model collaborative governance dalam pembangunan pariwisata alam di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(4), 41–46. doi: 10.36982/jpg.v7i4.2461
- Bevir, M. (2009). *Key concepts in governance*. London: SAGE Publications.
- Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2011). *Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times*. New Jersey: Princeton University Press.
- Henry, N. (2007). *Public administration and public affairs*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hidayah, N. (2019). *Pemasaran destinasi pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan desa wisata berbasis collaborative governance di Kota Batu. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84. doi: 10.26618/kjap.v6i1.3119
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7–12. doi: 10.31258/jkp.11.1.p.7-12
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Tamayao. (2014). *What is governance? Law, politics and philosophy*. <https://tamayaosbc.wordpress.com/2014/08/21/what-is-governance/>
- Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 281–298. doi: 10.14710/jppmr.v10i3.31412
- Widyarto, W. G. (2017). Analisis deskriptif: Kerjasama antara konselor dengan guru bidang studi. *Nusantara of Research*, 4(2), 100–106.